

BAB III

PROGRAM NUKLIR KOREA UTARA DAN REAKSI KOREA SELATAN TERHADAP PROGRAM NUKLIR KOREA UTARA

Pada masa Perang Dingin, nuklir menjadi roda kemudi yang harus dikendalikan secara hati-hati. Dengan berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap militer mereka, terutama persenjataan nuklir. Meski demikian, bukan berarti dunia steril dari ancaman nuklir. Ketidakpastian pasca Perang Dingin dan peristiwa 11 September 2001 justru memunculkan kekhawatiran baru tentang negara-negara "bandel" yang memiliki kepemilikan terhadap senjata nuklir. Praktik *deterrence* pada masa Perang Dingin setidaknya bisa membawa "*cold peace*". Tetapi kepemilikan nuklir di tangan negara yang tidak stabil bisa berujung pada bencana. Salah satu negara yang dikategorikan berbahaya hingga AS menggolongkannya ke dalam poros setan adalah Korea Utara.

Salah satu pertanyaan mendasar yang muncul yakni mengapa akhirnya sebuah Negara memutuskan untuk mengembangkan nuklir, seperti yang terjadi pada Korea Utara. Dalam menjelaskan alasan suatu Negara menggunakan nuklir tidak dapat dilihat dari satu faktor saja, melainkan menganalisa serangkain faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan proliferasi nuklir.

Perspektif pertama, mengemukakan bahwa teknologi nuklir itu sendiri merupakan faktor pendorong dibalik keputusan sebuah Negara untuk menggunakan senjata nuklir. Pemerintah memutuskan untuk menggunakan nuklir karena teknologi tersebut tersedia. Perspektif kedua yakni pengembangan senjata nuklir merupakan salah satu pilihan kebijakan yang diambil oleh suatu Negara dalam upaya untuk mencapai kepentingan nasionalnya.¹⁴

Melihat dari dua perspektif tersebut, yang menjadi faktor Korea Utara mengembangkan senjata nuklirnya bisa jadi tidak hanya karena satu faktor saja, melainkan serangkain faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Untuk itu, di bab ini akan dijelaskan mulai dari latar belakang program nuklir Korea Utara, perkembangannya, dan respon terhadap program nuklir Korea Utara.

A. Program Nuklir Korea Utara

Dengan senjata nuklir yang dimilikinya, Korea Utara dapat menjadi sebuah ancaman bagi stabilitas regional. Namun Pengalaman AS dan Uni Soviet menunjukkan kepemilikan nuklir tidak sejalan dengan keinginan untuk menggunakannya.

Opsi perang dengan senjata nuklir berarti suatu Negara harus siap untuk hancur lebur, dan tidak ada negara yang mau mengambil resiko fatal seperti itu.

¹⁴ Jurnal Hubungan Internasional. volume II No.2 Maret 2007. Laboratorium Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UMY. Yogyakarta 2007.

Alih-alih untuk militer, nuklir justru lebih relevan ditinjau dari sudut pandang politis diplomatis. Bagi Korea Utara yang membutuhkan banyak dana dari negara-negara yang lebih kuat dan makmur darinya, nuklir bisa menjadi alat diplomasi yang amat relevan.

1) Latar Belakang Program Nuklir Korea Utara

Isu nuklir Korea Utara berawal dari kegiatan proyek untuk pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara secara rahasia. Pada awal tahun 1990an, kenyataan bahwa Korea Utara mengembangkan senjata nuklir terbongkar (krisis nuklir Korea Utara putaran pertama). Pada 1995, Korea Utara setuju, setelah setahun melakukan negosiasi dengan AS untuk menghentikan pengembangan senjata nuklirnya dan akan mendapatkan reaktor air ringan untuk menuntaskan masalah energinya sebagai imbalan.

Namun, Korea Utara kembali menjalankan proyek pengembangan nuklir secara rahasia sehingga memicu krisis nuklir Korea Utara putaran kedua. Masalah itu muncul setelah asisten menteri luar negeri AS, James Kelly mengunjungi Pyongyang pada Oktober 2002, dan mitranya dari Korea Utara secara pribadi mengakui mereka memiliki program nuklir.

Korea Utara mengklaim bahwa AS telah melanggar perjanjian Jenewa dengan penundaan konstruksi reaktor air ringan, sedangkan AS menuduh Korea Utara terus melanjutkan program nuklirnya bahkan setelah menyetujui perjanjian internasional¹⁵

¹⁵ http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/faq_01.htm

Alasan pertama Korea Utara begitu bersikeras pada pengembangan senjata nuklir adalah untuk menjaga keamanan rejim Korea Utara. Korea Utara menganggap AS sebagai ancaman utama. AS juga mengawasi Korea Utara sebagai negara pendukung teroris. Dengan alasan itu, Washington memberikan sanksi ekonomi kepada Pyongyang. Dalam keadaan seperti itu, melihat hasil perang di Afganistan dan Irak, Korea Utara mengkhawatirkan bahwa pihaknya akan menjadi sasaran berikutnya dalam daftar Negara yang akan diserang oleh AS. Oleh karena itu, Korea Utara menaruh perhatian pada pengembangan senjata nuklir dengan harapan bahwa nuklir tersebut akan mencegah AS untuk tidak melakukan aksi provokasi militer terhadap Korea Utara.

Alasan kedua yaitu dengan kepemilikan senjata nuklir menjadikan Korea Utara memiliki posisi unggul dalam negosiasi. Keamanan rezim Korea Utara bisa dicapai dengan sempurna melalui perbaikan hubungan dengan AS. Oleh karena itu, menurut pandangan Korea Utara, kepemilikan senjata nuklir akan meningkatkan motivasi AS untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara.

Korea Utara yakin bahwa program nuklirnya merupakan cara yang efektif untuk membawa AS ke meja negosiasi, maupun sebagai suatu alat penjamin keamanan rezimnya. Dalam proses negosiasi itu, Korea Utara mempercayai bahwa selain menjaga keamanan rezimnya, dengan pengembangan program nuklir yang dilakukannya maka pihaknya akan mendapat keuntungan ekonomi seperti program bantuan yang bervariasi. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Korea Utara mengejar program nuklir sebagai strategi inti agenda utama nasional.

2) Perkembangan Program Nuklir Korea Utara

Pasca perang Korea, hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan menunjukkan persaingan sengit, terutama dalam hal kekuatan nasional, keunggulan sistem nasional dan ideologinya sendiri. Persaingan tajam ini memberikan dampak pada tertundanya kemajuan perekonomian kedua negara, karena pemborosan yang tidak berarti dalam persaingan mereka terutama dalam biaya pertahanan yang sangat besar. Pada masa-masa inilah Korea Utara mulai mengembangkan teknologi nuklirnya.

Dengan memanfaatkan konflik antara pemerintah Beijing dan Moskow, sejak tahun 1950-an lalu Korea Utara dapat menyuplai teknologi dari Cina dan Rusia dan para insinyur Rusia dalam bidang pengembangan nuklir. Mereka juga sangat giat mengembangkan teknologi itu yang dimaksudkan untuk keperluan peperangan. Pada pertengahan dekade 1980an, intelijen Amerika Serikat mulai mendeteksi program nuklir Korea Utara dan tidak lama sesudahnya, tepatnya di tahun 1986, Korea Utara mulai memproduksi plutonium di reaktor. Jelas bahwa mereka berniat mengembangkan nuklir sebagai persenjataan¹⁶.

Pada tahun 1991 pun AS sudah memulai pembicaraan untuk membujuk Korea Utara menghentikan program nuklirnya. Korea Utara sempat mengancam akan mengundurkan diri dari rezim *Non-Proliferation Treaty* (NPT). Saat itu, AS telah bersiap-siap untuk menyerang fasilitas nuklir Korea Utara.

Bencana berhasil dihindari setelah di tahun 1994 pemerintahan Bill Clinton mencapai *Agreed Framework*, dimana Korea Utara setuju untuk

¹⁶ <http://sklasvik.wordpress.com/2008/04/02/nuklir-korut/>

membekukan program nuklirnya selama delapan tahun. *Agreed Framework* menjanjikan pengiriman bahan bakar dan bantuan teknologi untuk membangun dua reaktor air raksa untuk kepentingan energi, sebagai resiprositas atas sikap kooperatif Korea Utara yang menghentikan proyek nuklirnya. Pasca tercapainya *Agreed Framework*, Korea Utara sempat menguji coba misil Taep'o-dong-1. Tetapi rencana uji coba lebih lanjut dihentikan terkait tekanan dari AS.

Namun, krisis kembali dimulai dengan adanya kecurigaan Amerika Serikat saat Korea Utara kembali mengembangkan program nuklirnya pada Oktober 2002. Padahal, berdasar perjanjian 1994 Korea Utara seharusnya membekukan program itu. Kompensasinya, Amerika Serikat mengirim 500.000 ton BBM pengganti energi nuklir ke Korea Utara. Perjanjian mengalami pasang surut. Perseteruan pun tak terhindarkan setelah Korea Utara mengaktifkan kembali program senjata nuklir rahasia yang kaya uranium, dan Amerika Serikat membalas dengan menghentikan pengiriman BBM ke Korea Utara yang berlaku sejak 15 Desember 2002. Korea Utara kemudian menanggapi dengan memindahkan semua peralatan pemantauan fasilitas nuklir PBB di Yongbyon, pusat pengembangan nuklir di Korea Utara, dan diikuti dengan perginya seluruh personel inspeksi nuklir PBB meninggalkan Korea Utara.

Masih pada bulan yang sama, terjadi insiden pengecatan kapal Sosan milik Korea Utara oleh Angkatan Laut Spanyol yang mengangkut paket rudal Scud ke Yaman. Peristiwa ini semakin menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional dan meningkatkan ketegangan antara Korea Utara dengan negara-

negara barat dan tetangganya di Asia Timur. Selain itu, Korea Utara terbukti tidak ragu-ragu menjual teknologi mereka untuk mendapatkan *financial gain*.

Keluarnya Korea Utara dari rezim non-proliferasi mendapat kecaman dari internasional, tidak terkecuali Korea Selatan, yang menilai bahwa tindakan Korut telah merusak upaya normalisasi hubungan kedua negara yang sempat mengalami kemajuan pesat dengan disepakatinya perjanjian kerjasama bilateral di berbagai bidang, diantaranya ekonomi dan pertahanan, pada tahun 2000 lalu. Namun Korea Selatan tetap mempertahankan sikap dengan tidak mengeluarkan opsi militer terhadap ambisi nuklir Korea Utara. Korea Utara sendiri mengklaim bahwa reaktor nuklir di Yongbyon hanya untuk tenaga listrik. Namun beberapa ahli menilai reaktor itu bisa untuk memproduksi senjata plutonium. Uji coba rudal antikapal yang kemudian dilakukan oleh Korea Utara dan jatuh di Laut Jepang dan Pantai Timur pada bulan Februari dan Maret 2003 menjadi bukti keseriusan pengembangan persenjataan nuklir Korea Utara.

Masyarakat dunia kemudian kembali dikejutkan dengan aksi peluncuran peluru kendali Korea Utara pada tanggal 5 Juli 2006. Peluncuran beberapa rudal di Semenanjung Korea itu kian mengkhawatirkan beberapa negara, bahkan Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan Australia mengecam tindakan itu.

Dewan Keamanan PBB pada 5 Juli 2006 telah membicarakan hal ini atas permintaan perwakilan Jepang di PBB. Peluncuran rudal itu dapat diartikan Korut ingin mendapat posisi lebih kuat dalam perundingan damai soal nuklir Korut bersama enam negara (*Six Party Talks*), yang mengalami kebuntuan. Korea Utara juga kian frustrasi dengan jalan damai itu, setelah mengikuti *Six Party Talks*

bersama AS, Korea Selatan, Jepang, China, dan Rusia, dan hingga kini belum mendapat hasil. Puncaknya, pada 9 Oktober 2006, Korea Utara mengumumkan bahwa mereka telah berhasil melaksanakan uji coba nuklir, yang kemudian diverifikasi kebenarannya oleh Amerika Serikat dua hari kemudian.

Sebagai respon, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada tanggal 14 Oktober 2006 menyetujui dengan suara bulat resolusi yang mengutuk Korea Utara karena telah melakukan uji coba nuklir. DK PBB dengan resolusi tersebut menjatuhkan sanksi yang cukup keras terhadap Korea Utara. Resolusi tersebut antara lain menuntut agar Korea Utara tidak lagi melakukan uji-coba nuklir atau meluncurkan rudal balistik; mewajibkan Korea Utara menghentikan kegiatan yang berkaitan dengan program rudal balistik; dan menghentikan semua program senjata nuklir dan program nuklir. DK PBB juga menuntut agar Korea Utara kembali ke NPT dan IAEA *safeguards*. Penting pula dicatat bahwa langkah-langkah DK PBB ini diambil berdasarkan Pasal 41 Piagam PBB, yaitu tindakan tanpa menggunakan kekuatan militer.

Setelah Korea Utara dipukul telak dengan berbagai sanksi oleh DK PBB dan sanksi financial oleh AS, atas upaya diplomasi Korea Selatan dan China, Korea Utara mulai menunjukkan sikap konstruktif. Demikian juga AS, yang memungkinkan kembali digelarnya *six-party talks* bulan Desember tahun lalu. Namun perundingan yang berakhir pada tanggal 22 Desember 2006 tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

Perkembangan terakhir menunjukkan hal positif. Pada tanggal 13 Feb 2007, Korea Utara menyetujui untuk menutup reaktor nuklirnya di Yongbyon pada pertengahan April dan mengizinkan inspektor PBB memasuki negara tersebut bila sanksi keuangan bagi negara tersebut dihapuskan. Akhirnya dicapai kesepakatan bahwa dana Korea Utara yang berjumlah sekitar US\$25 juta yang dibekukan di Banco Delta Asia di Macau sejak 2005 akan segera dicairkan. Korea Utara sepakat untuk menghentikan program nuklirnya dan sebagai imbalannya Korea Utara akan mendapatkan bantuan energi dan konsesi diplomatik. Korea Selatan sendiri menjanjikan bantuan awal bahan bakar 50 ribu ton, dan menyambut baik kesepakatan yang telah dicapai pihak-pihak dalam perundingan tersebut yang dapat mempercepat proses perlucutan senjata nuklir Korea Utara.

Namun, ditengah pelaksanaan proses perdamaian dan denuklirisasi tersebut, Korea Utara pada Senin 25 Mei 2009 kembali mengejutkan masyarakat internasional dengan uji coba peledakan nuklirnya di bawah tanah untuk kedua kalinya dalam dua setengah tahun terakhir dan peluncuran peluru kendali jarak menengahnya. Ketika Korea Utara meluncurkan roketnya ke orbit satu bulan sebelumnya, Jepang sempat mengusulkan sidang darurat Dewan Keamanan (DK) PBB. Belum sempat sidang darurat itu digelar, Korea Utara kembali melakukan uji coba pada tanggal 25 Mei 2009. Karena itu, masyarakat internasional mendesak DK PBB untuk mengeluarkan resolusi baru yang lebih keras.

Uji coba itu telah menempatkan Seoul berada dalam risiko yang sulit dihindari. Seoul berada di wilayah dengan konsentrasi artileri, roket artileri, dan rudal balistik jarak menengah Korea Utara yang sangat tinggi. Perilaku Pyongyang

memang sulit diprediksi, di mana potensi serangan pre-emptive terhadap fasilitas nuklirnya terlalu penuh risiko, bukan karena ditemukannya kapabilitas nuklir di Korea Utara, tetapi karena kapabilitas Korea Utara untuk melakukan aksi balasan yang dapat membuat ibu kota Korea Selatan itu menjadi "lautan api".

Keberhasilan Korea Utara dalam mengembangkan program nuklirnya ini jelas akan semakin menambah ketegangan di kawasan Asia Timur. Dengan demikian, keberhasilan pengembangan program nuklir Korea Utara dapat menjelaskan pentingnya Korea Utara bagi stabilitas keamanan di Asia Timur. Sehingga masalah nuklir Korea Utara ini sangat mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur, bahkan Amerika Serikat pun merasa terancam oleh kepemilikan senjata nuklir Korea Utara tersebut.

3) Nuklir sebagai alat Diplomasi bagi Korea Utara

Korea Utara memang sangat memahami bagaimana memanfaatkan kemampuan nuklirnya untuk berdiplomasi. Dengan nuklir, negeri di Semenanjung Korea itu bisa dengan mudah menggaet bantuan, mulai beras sampai bahan bakar. Jadi, berbagai sanksi dan resolusi PBB pun tak begitu berdampak bagi mereka. Dengan nuklir pula, negeri yang secara teknis masih berada dalam status perang dengan Korea selatan itu mampu mengerek daya tawarnya saat bernegosiasi dengan musuh-musuhnya.

Pada tahun 1950an Korea Utara diketahui telah melakukan pembangunan reaktor nuklir model Uni Soviet untuk tujuan penelitian di Yongbyeon. Seiring dengan perkembangan dan dinamika perpolitikan internasional, isu nuklir di Korut-pun meningkat menjadi isu krisis nuklir, terutama pada tahun 1990an. Hingga saat sekarang ini kepemilikan Korut atas nuklirnya dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan internasional. Terlebih ketika Korea Utara kembali nekat melakukan uji coba nuklirnya pada bulan Mei 2009.

Ketua Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), sebuah badan milik Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)- El-Baradei pada saat itu mengungkapkan bahwa uji coba peledakan senjata nuklir Korut merupakan “ancaman keamanan serius” dan sebuah kemunduran dalam pencegahan penyebaran senjata nuklir. Uji coba nuklir sebagaimana yang dilaporkan itu mengancam aturan non-proliferasi nuklir dan menciptakan ancaman keamanan serius bukan hanya untuk wilayah Asia Timur tetapi juga bagi masyarakat internasional.¹⁷

Isu ini juga memancing respon negara-negara lainnya terutama Amerika Serikat (AS), Jepang, Korea Selatan, Cina dan termasuk PBB dalam menghadapi Korut yang secara konsisten terus melakukan uji coba nuklir. Banyak hal yang dilakukan mulai dari negosiasi-negosiasi dan perundingan demi perundingan dilakukan, hingga memberikan sanksi-sanksi ekonomi terhadap Korut demi penghentian pengembangan teknologi nuklir Korea Utara.

¹⁷ <http://fislip.unand.ac.id/hl/blog/?p=260>

Jika mengkaji lebih dalam mengenai alasan dibalik Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya dapat diartikan sebagai sebuah alat diplomasi. Hal ini dapat dilihat dari dua sisi kepentingan yang tengah melilit Korea Utara. Yakni sebagai rangkaian usaha untuk menagih janji-janji negara-negara maju yang belum terpenuhi disatu sisi. Hal ini dapat dikaitkan dengan terpilihnya Barack Obama sebagai presiden. Dimana Obama berkomitmen untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Il untuk membahas mengenai pemulihan keamanan regional di Asia Timur. Namun, Amerika Serikat selalu menghindari pertemuan bilateral dengan Korea Utara.

Sedangkan kepentingan Korea Utara disisi lain terkait dengan kondisi politik domestik Korea Utara itu sendiri. Secara eksplisit bisa dikatakan bahwa kondisi politik domestik Korea Utara sedang mengalami krisis. Hal ini tak terlepas dari kondisi fisik Kim Jung Il, pemimpin tertinggi Korea Utara yang sudah menurun. Untuk menutupi krisis politik domestik tersebut, uji coba nuklir dilakukan sebagai upaya show up kepada masyarakat internasional bahwa Korea Utara adalah Negara yang tangguh.

Kepentingan Korea Utara akan uji coba nuklir pun tidak berhenti sampai di situ. Daya jelajah nuklir Korea Utara yang diisukan bisa mencapai Australia dengan kecepatan tertentu, menjadi daya jual tersendiri bagi produk roket Korea Utara. Kapasitas missile yang dimiliki Korea Utara memiliki beragam jenisnya, mulai dari jenis Rodong dengan jangkauan 1,300 km hingga Taepodong

multistage 2,200 km.¹⁸ Hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjang perekonomian Korea Utara, mengingat pendapatan negara yang diperoleh Korea Utara dengan bisnis kerjasama Korea Relationship mengalami penurunan yang signifikan.

Dari beberapa peristiwa yang terjadi, dapat dikatakan bahwa tindakan Korea Utara yang selalu mengancam dengan uji coba nuklirnya bisa dimasukkan ke dalam kategori diplomasi koersif. Karena dengan strategi diplomasi koersif maka suatu negara dapat memberikan pilihan kepada negara lain, yang dipandang sebagai musuh, untuk memenuhi keinginan nasionalnya atau bahkan menantang musuhnya tersebut. Dalam hal ini Korea Utara melakukan Uji coba nuklir untuk memenuhi kepentingan nasionalnya atau bahkan menantang negara-negara yang dianggap sebagai musuhnya seperti Amerika Serikat.

Betapa pun kerugian yang dialami Korea Utara ketika secara terbuka mendeklarasikan diri sebagai negara bersenjata nuklir, ada strategi yang logis di balik deklarasi Korea Utara sebagai negara berkekuatan senjata nuklir. Korea Utara percaya tindakan ini akan memberikan keuntungan strategis, simbolis, dan teknologi yang dibutuhkan negaranya dalam jangka panjang untuk mewujudkan Korea Utara yang kuat. Sesuai dengan definisi strategi nuklir sebagai pemanfaatan senjata nuklir untuk meraih kepentingan politik internasional, nuklir bagi Korea Utara dapat menjadi alat penting dalam perundingan-perundingan internasional.

¹⁸ <http://ipsindonesia.com/v2/?p=286>

B. Reaksi Korea Selatan Terhadap Program Nuklir Korea Utara

Tindakan-tindakan yang diambil oleh negara-negara seperti AS, Cina, Korea Selatan, Jepang, atau bahkan PBB dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara, baik itu berupa sanksi ekonomi, sanksi militer atau berupa bantuan pemenuhan sumber daya adalah suatu bentuk respon, bentuk dari politik internasional antara negara-negara tersebut dan PBB dengan Korea Utara. Karena dengan tindakannya yang terus menerus melakukan uji coba nuklir tanpa mengindahkan perjanjian-perjanjian internasional yang telah disepakati sebelumnya, resolusi dari PBB hingga sanksi-sanksi ekonomi yang dilakukan kepada Korea Utara, bisa diartikan bahwa Korea Utara memaksa lingkungan internasional dengan ancaman uji coba nuklirnya, untuk melakukan sesuatu terhadap negaranya, apakah itu berupa sebuah bantuan atau imbalan atau malah sebuah sanksi yang dikenakan terhadapnya.

Dalam kaitannya dengan uji coba senjata pemusnah masal yang dilakukan Korea Utara, terdapat hal yang menarik yang perlu diamati yaitu perbedaan reaksi Korea Selatan pada masa pemerintahan presiden Kim Dae Jung dan pada masa jabatan presiden Lee Myung bak. Presiden Kim lebih memilih bantuan kemanusiaan untuk melakukan pendekatan dengan Korea Utara, sebaliknya Presiden Lee lebih memilih menghentikan program bantuan ekonominya terhadap Korea Utara untuk menanggapi uji coba nuklir yang dalam 3 tahun terakhir telah melakukan uji coba sebanyak dua kali.

1) Pada masa Pemerintahan Kim Dae Jung

Hubungan baik Korea Utara dengan Korea Selatan sempat terjalin dengan baik pada masa pemerintahan presiden Kim Dae Jung. Meskipun status kedua Negara secara teknis sejak Perang Korea tahun 1953 belum secara resmi menandatangani perdamaian kedua belah pihak, namun hubungan kedua pihak tidak mengalami ketegangan seperti sekarang pada masa pemerintahan presiden Lee. Pada masa pemerintahan Presiden Kim Dae-jung (1998-2003) terjadi perbaikan hubungan Korea Utara-Selatan. Melalui sebuah kebijakan yang terkenal dengan nama 'Sunshine policy', Kim Dae-jung mencoba merangkai lagi hubungan baik antara ke dua negara. Ia dikenal sebagai seorang pendukung demokrasi dan merupakan politisi yang memprakarsai pertemuan puncak pertama antara kedua negara Korea tahun 2000 di saat ia menjabat sebagai presiden Korea Selatan. Kim Dae-Jung adalah perintis apa yang dinamakan kebijakan politik "Sinar Matahari". Melalui kebijakan ini ia berhasil melakukan pendekatan dengan negara tetangganya Korea Utara yang komunis.

Setelah Kim Dae Jung dilantik menjadi presiden Republik Korea, beliau menetapkan kebijakan Sinar Matahari dengan maksud untuk mengajak Korea Utara masuk kedalam arena masyarakat Internasional. Korea utara adalah Negara yang tertutup ketat dari dunia luar, tidak mau mendengar nasehat, ajakan dan undangan kerjasama dari Negara lain. Mereka tetap mencari jalan tersendiri dengan menggunakan ideology Ju-che. Untuk itulah Presiden Kim Dae Jung ingin mencoba menyinari Korea Utara dengan kebijakan "sinar matahari". Meskipun

banyak kalangan dalam negeri yang menentang kebijakan tersebut, Presiden Kim tetap melaksanakan kebijakan tersebut.

Korea Selatan mencoba merangkul saudaranya di Korea Utara dengan membangun hubungan diplomatik yang lebih baik serta memberi bantuan ekonomi. Dibawah pemerintahan Kim Dae Jung kebijakan sinar matahari pertama kali di formulasikan dan diimplementasikan. Kerjasama bisnis utara-selatan dimulai, termasuk pembangunan jalan kereta api dan kawasan wisata kumgangsan, dimana ribuan penduduk Korea Selatan melakukan perjalanan wisata. Melalui kerjasama tersebut kedua belah pihak memperoleh keuntungan.

Pada masa jabatannya, presiden Kim Dae jung tidak bersikap keras terhadap program nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara. Menurut presiden Kim, kebijakan terhadap Korea Utara tidak boleh berlandaskan pada pertentangan melainkan melalui bantuan kemanusiaan agar dapat membimbing Korea Utara untuk membuka diri terhadap dunia internasional. Presiden Kim menyalurkan bantuan ke Korea Utara baik dalam bentuk uang maupun barang bertujuan agar Korea Utara dapat melakukan pemulihan ekonomi dan membuka diri terhadap dunia internasional.

Kunjungan kim Dae Jung ke Korea Utara dan berhasilnya pertemuan puncak di Pyongyang pada tanggal 14-16 Juni 2000 merupakan hasil kebijakan sinar matahari yang dilaksanakannya dengan sabar. Hadiah Nobel Perdamaian untuk tahun 2000 akhirnya diberikan kepada Presiden Kim Dae Jung. Presiden Kim dianggap berhasil menjaga perdamaian di semenanjung Korea dan menjalin

hubungan baik dengan Korea Utara melalui kebijakan sinar matahari tersebut. Namun pada kenyataannya hubungan Korea Utara dan Korea selatan tetap mengalami pasang surut. Hal ini dikarenakan hingga saat ini Korea Utara tetap menjalankan program pengembangan nuklirnya. Setiap kali ada perubahan pemerintahan baru di Korea Selatan, selalu ada kebijakan terhadap Korea Utara termasuk masalah reunifikasi. Namun kebijakan tersebut tidak dapat berlangsung lama karena ada tanggapan negatif dari pihak Korea Utara.

Reaksi Korea Selatan terhadap program nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan Presiden Roh Moo hyun tidak jauh berbeda dengan presiden Kim Dae Jung. Pada tahun 2003, isu mengenai kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara muncul kembali, dimana kedua Negara Korea dan AS saling menuduh satu sama lain melanggar perjanjian kerangka kerja. Namun demikian, presiden Roh tetap menjalankan kebijakan tersebut dan pemerintahannya tetap memberikan bantuan kemanusiaan terhadap Korea Utara. Demikian juga ketika terjadi aksi penembakan sebuah misil oleh Korea Utara ke wilayah laut internasional diantara kepulauan Jepang dan Semenanjung Korea pada tahun 2006 silam tidak menimbulkan reaksi keras dari pihak Korea Selatan.

Pihak Korea Selatan hanya mengingatkan bahwa ambisi Korea Utara untuk tetap menjalankan program nuklirnya dapat mengganggu perdamaian dan stabilitas regional. Namun Korea Selatan tetap yakin bahwa prioritas utama untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara tersebut adalah dengan cara damai. Dapat diambil kesimpulan bahwa pada masa pemerintahan Kim Dae jung dan Roh

Moo hyun, reaksi yang muncul dari Korea Selatan terhadap pengembangan program nuklir Korea Utara yang sangat memakan dana yang begitu besar, sementara begitu banyak rakyat Korea Utara yang menderita dan kelaparan, adalah dengan memberikan bantuan kemanusiaan terhadap Korea Utara.

2) Pada masa Pemerintahan Lee Myung bak

Lebih dari satu dekade, para pemimpin Korea Selatan telah menghabiskan dana jutaan dolar untuk rejim Kim dalam bentuk uang tunai dan bantuan tanpa memeriksa penggunaan dana tersebut, mengabaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara dalam skala besar, dan mengandalkan pada diplomatik multilateral yang tidak pernah memberikan hasil yang nyata. Oleh karena itu, presiden Lee ingin mengubah pendekatannya terhadap Korea Utara agar Korea Utara dapat menghentikan program nuklirnya secara perlahan.

Setelah uji coba nuklirnya yang pertama pada tahun 2006, Presiden Korea Selatan Lee Myung bak telah mengumumkan mengaitkan kebijakan bantuan ekonominya dengan perlucutan nuklir dan juga menyerukan agar Korea Utara lebih membuka sistem komunis garis kerasnya. Hal itu dianggap oleh presiden Lee sebagai sebuah kebijakan yang tepat untuk isu nuklir Korea Utara. Presiden Lee, yang berkuasa sejak Februari 2008 lalu, mengakhiri kebijakan "cahaya matahari" dari presiden-presiden yang digantikannya, dan mengaitkan bantuan ekonomi Korea Selatan pada usaha-usaha perlucutan senjata nuklir Korea Utara.

Ini adalah bentuk respon Korea Selatan terhadap beberapa aksi uji coba nuklir Korea Utara yang selalu mengabaikan peringatan dari Negara-negara lain.

Setelah dilantik, Presiden Lee mengajukan penawaran terhadap Korea Utara untuk segera menghentikan program pengembangan senjata nuklirnya. Presiden Lee memang mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas terhadap Korea Utara dibandingkan presiden Korea Selatan terdahulu, hal ini sebagai bentuk respon terhadap program uji coba yang berulang kali dilakukan oleh Korea Utara yang mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan semenanjung Korea.

Presiden Lee menyebutkan apabila Korea Utara melakukan denuklirisasi maka pihaknya akan tetap memberikan bantuan ekonomi terhadap Korea Utara, tetapi jika tidak maka ia akan menghentikan bantuannya. Korea Selatan menganggap uji coba nuklir tidak hanya menjadi ancaman keamanan di semenanjung Korea dan regional Asia Timur, namun juga dapat berdampak terhadap stabilitas perekonomian negaranya. Sehingga presiden Lee menganggap sikap tegas terhadap program nuklir Korea Utara adalah satu-satunya cara untuk menghentikan program nuklirnya. Namun respon tersebut tidak disambut baik oleh pihak Korea Utara.

Bentuk lain dari respon Korea Selatan terhadap uji coba nuklir Korea Utara adalah dengan melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam hal kerjasama militer dan keamanan nasionalnya. Ini dilakukan sebagai upaya untuk pertahanan diri apabila sewaktu-waktu terjadi invasi dari Korea Utara.

Pemerintah Lee mengatakan pada negara tetangga yang miskin itu, jika menghendaki bantuan lagi, maka Korea Utara harus memperbaiki HAM di negaranya. Ditambah dengan kesepakatan mengenai pelucutan nuklir internasional. Selain itu juga mengembalikan lebih dari 1.000 orang Korsel yang diculik sejak perang Korea 1950-1953. Dan untuk melancarkan kesepakatan nuklir, Presiden Lee telah menyiapkan paket bantuan kepada Korea Utara yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita dari beberapa ratus dolar menjadi USD 3.000 (Rp 27,8 juta).¹⁹ Pemerintah Lee mengatakan akan lebih mendekati kerja sama dengan AS dan Jepang. Sikap itu untuk menekan Korea Utara agar mengubah perlawanannya.

Berbeda dengan presiden Korea Selatan sebelumnya, respon yang dilakukan Korea Selatan terhadap uji coba nuklir Korea Utara lebih kepada pemberian sanksi yang tegas daripada memberikan bantuan kemanusiaan. Selain dikhawatirkan bantuan yang selama ini diberikan oleh pemerintah Korea Selatan juga digunakan untuk mendanai pengembangan program nuklirnya oleh Korea Utara, Presiden Lee juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dalam negerinya. Perekonomian Korea Selatan setelah terkena dampak krisis global masih terpuruk. Seperti janjinya dalam kampanye, Presiden Lee akan lebih memfokuskan pada usaha pemulihan ekonomi dalam negeri Korea Selatan. Masih banyak rakyat Korea Selatan yang berada di tingkat ekonomi bawah. Pengangguran dan

¹⁹ <http://www.jambi-independent.co.id/home/modules.php?name=News&file=article&sid=7973>

kesenjangan ekonomi juga masih menjadi masalah bagi Korea Selatan. Oleh sebab itu, Presiden Lee menghentikan bantuan ekonominya terhadap Korea Utara.

Supaya Korea Utara mau menghentikan program nuklirnya, Korea Selatan menawarkan kerjasama kedua belah pihak. Banyak pihak yang berspekulasi selain untuk kelangsungan hidup warganya, dana yang digunakan lebih banyak untuk mengembangkan program nuklirnya.

Selain memberikan sanksi yang tegas, respon Korea Selatan dalam menanggapi program nuklir Korea Utara yakni dengan meningkatkan ketahanan nasional dan kemampuan militer Korea Selatan. Sehingga apabila Korea Utara menyerang Korea Selatan, Maka Korea Selatan telah memiliki pertahanan yang kuat untuk menghadapi pasukan Korea Utara dengan senjata nuklirnya. Selain melakukan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat, Korea Selatan melakukan kerjasama dibidang pertahanan nasional dengan pemerintah Jepang. Jepang yang merasa terancam dengan keberadaan senjata nuklir milik Korea Utara segera meningkatkan ketahanan negaranya dan bekerjasama dengan Korea Selatan. Program nuklir Korea Utara juga mendapat respon yang cukup serius dari Negara-negara yang berada di Asia Timur seperti Jepang dan China. Selain itu Korea Utara juga mendapat sanksi dari PBB yaitu embargo ekonomi terhadap Korea Utara.